

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRANGILI TRAWANGAN PADA ZONA PERIKANAN BERKELANJUTAN DI MASA PANDEMI COVID 19**

**Junaidi<sup>1</sup> Handri Jurya Parmi<sup>2</sup>**

Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani

[junling115@gmail.com](mailto:junling115@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan gili trawangan dimasa pandemi covid 19 dengan efektivitas pengelolaan sebelum masa pandemi covid 19 khususnya pada zona perikanan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif yaitu menganalisa 4 kreteria dan 4 indikator dari 24 indikator pelaksanaan pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Data direduksi dengan Teknik wawancara mendalam dengan responden yaitu, kepala BKKPN Kupang, ketua POKDARWIS Gili Matra, ketua POKMASWAS gili matra, serta beberapa pelaku usaha pariwisata gili matra dan tokoh masyarakat Gili Trawangan. Efektivitas pengelolaan kawasankonservasi perairan Gili Trawawangan dimasa pandemi covid 19 ditinjau dari empat kreteria dan empat indikator didapatkan tidak epektif ini disebabkan oleh pemotongan anggaran dari kantor pusat. Sehingga ada program programyang sipatnya rutin tiap tahun sebelum covid tidak bisa dilangsungkan, seperti: rehabilitasi ekosistem, surve habitat biota biota penting dan konservasi *go to schoole*, survey habitat, Yang masih berjalan tapi volume dikurangi adalah monitoring kesesuaian zonasi dan peruntukannya, Dengan tidak terlaksananya program program ini denganmaksimal menyebabkan pengelolaan kawasan menjadi tidak epektif. Demikian juga dengan kreteria proses dengan indikator pemberdayaan masyarakat dan mitra pelaksanaan konservasi menjadi terhambat ini terkait juga dengan kurangnya anggaran untuk menjalankan indikator proses. Tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadapkonservasi relative tinggi ini dipengaruhi oleh pegangan prinsip kearifan kearifan lokal dan panduan oleh perdes konservasi. Perdes konservasi ini merupakan elementasi dari awiq awiq. Begitu juga dengan Kreteria outcome denganindikator partisipasi masyarakat terhadap konservasi pada masa pandemi covid 19 berdasarkan wawancara dengan ketua pokdarwis tramena dan ketua pokmaswas yang ada, karena kurangnya kesibukan usaha pariwisata maka sebagian besar masyarakat berlaih melakukan aktivitas sebagai nelayan dan mau peduli terhadap batasan zona dan pemanfaatan zona yang ada dengan baik.

*Kata kunci: efektivitas, konservasi, covid 19*

### **Abstract**

The flexibility and supportive situation provide an overview of whether or not the management of a conservation area is effective. Thus the research was conducted on how the effectiveness of the management of the Gili Trawangan waters conservation area during the covid 19 pandemic. The purpose of this study was to compare the effectiveness of the management of the Gili Trawangan waters conservation area during the covid 19 pandemic with the effectiveness of management before the covid 19 pandemic, especially in the sustainable fisheries zone. The method used in this study is a qualitative descriptive method, namely analyzing 4 criteria and 4 indicators from 24 indicators of the implementation of technical guidelines for evaluating the effectiveness of conservation area management. matra, as well as several Gili Matra tourism business actors and Gili Trawangan community leaders. The effectiveness of the management of the Gili Trawangan marine conservation area during the COVID-19 pandemic in terms of four criteria and four indicators was found to be ineffective due to budget cuts from the head office. So

that there are programs that are routinely every year before Covid cannot be carried out, such as: ecosystem rehabilitation, surveys of important biota habitats and conservation go to schools, habitat surveys. these programs maximally cause area management to be ineffective. Likewise, the process criteria with indicators for community empowerment and conservation implementation partners are hampered, this is also related to the lack of budget to carry out process indicators. This relatively high level of community knowledge and compliance with conservation is influenced by the holding of local archival principles and guidelines by the conservation village regulation. This conservation regulation is an element of *awiq awiq*. Likewise with the outcome criteria with indicators of community participation in conservation during the COVID-19 pandemic based on interviews with the head of the *pokdarwis* *trama* and the head of the existing *pokmaswas*, due to the lack of business in the tourism business, most of the people practice doing activities as fishermen and want to care about zone boundaries and utilization. existing zone well.

*Keywords: effectiveness, conservation, covid 19*

## PENDAHULUAN

Kawasan Konserpasi Nasional terdiri dari sepuluh kawasan konservasi. Kawasan konserpasi terbagi menjadi taman wisata perairan (TWP) 7 kawasan, dan 3 Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP). Kawasan konservasi tersebut diantaranya adalah; 1. KKPN TWP Pulau Pieh, 2, KKPN TWP Kep. Anambas, kedua kawasan ini dikelola oleh KKP dibawah pengawasan LKKN Pekan Baru. 3. KKPN TWP Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan (Gili Matra) 4. KKPN TWP Laut SAWU, 5. KKPN TWP Kep. Kapoposang, 6. KKPN TWP Laut Banda, 7. KKPN SAP Aru Bagian Tenggara, 8. KKPN SAP Kep. Raja Ampat, 9. KKPN SAP Wai Geo Sebelah Barat, dan 10. KKPN TWP Kep. Padaido kedelapan kawasan ini dikelola oleh KKP dibawah pengawasan BKKPN Kupang (Slamet, 2021, akses 20 juni 2022).

Kawasan konservasi perairan nasional Gili Matra dalam Pengelolaan Zonasi dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2034 dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah pengawasan dan satuan unit kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan NO 57/MEN/2014. TWP Gili Matra memiliki luas kawasan perairan 2.273,56 ha terbagi menjadi tiga kawasan konservasi ; 340 ha Gili Trawangan, 150 ha Gili Meno, dan 175 ha Gili Ayer. (Azhar Muttakin, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2010 dinyatakan Kawasan konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. System zonasi merupakan system yang bisa memberikan batasan batasan pemanfaatan secara

berkala sehingga bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Mulyoto. 2011, menjelaskan pengelolaan suatu ekosistem perairan ditentukan oleh Pengelola dan pembuat kebijakan. Pertama, pengelola dan pengambil kebijakan harus cukup mampu mendeteksi perubahan besar yang terjadi pada kandungan unsur hara di ekosistem karena perubahan besar akan berdampak pada produktivitas seluruh ekosistem. Kedua, pengelola dan pembuat kebijakan harus berupaya keras untuk menyesuaikan laju dan pola pemanfaatan dari komponen-komponen ekosistem yang dapat menyebabkan perubahan produktivitas. Ketiga, pengelola harus menyadari aktivitas di darat dan laut yang dapat memasukkan bahan kimia baru atau mengubah tingkat unsur hara dan sedimen alami.

Bertitik tolak dari system pengelolaan dan pengambil kebijakan sebelumnya masyarakat sudah mempunyai kearifan dalam mengelola alam bahkan sesungguhnya sudah menjadi ciri dari bangsa Indonesia sejak lama. Pengelolaan kawasan perairan dengan cara konservasi merupakan bentuk kearifan dalam pengelolaan. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai kearifan lokal di berbagai daerah di tanah air yang merupakan warisan generasi terdahulu yang masih lestari hingga saat ini. Di pulau Lombok dan pulau Bali dikenal dengan *awiq awiq*, sasi di Maluku dan Papua, *Panglima Laot* di Aceh, *lubuk larangan* di Sumatera, *kelong* di Batam, *mane'e* di Sulawesi Utara, dan bahkan terdapat berbagai kearifan lokal yang berlaku dalam cakupan wilayah yang kecil di berbagai wilayah di nusantara. Hal itu berarti konservasi sebagai sebuah kearifan dalam pengelolaan bukanlah hal yang baru, tetapi merupakan wajah kearifan masyarakat dalam konteks modern yang dibingkai dalam aturan hukum negara. (Agussalim 2015)

Namun seiring perkembangan zaman yang

penuh kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya perairan di beberapa wilayah perairan Indonesia, permasalahan bermunculan, degradasi lingkungan perairan, komplik kepengingan pada zonasi yang ditentukan, sampai permasalahan kesehatan menerpa belahan dunia ini samapai lepel pandemi, wabah bermunculan satu demi satu dan sampai muncul Pandemi covid 19 yang membuat keterpurukan disegala lini di belahan bumi. Pengelolaan sumberdaya menjadi terhambat bahkan dihentikan sementara dengan berbagai alasan, Penanggulangan covid 19 ini menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia sehingga anggaran yang semula untuk bidang bidang yang sudah ditentukan dialihkan ke anggaran penangulangan bencana vandemi covid 19. Kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan terkait langsung dengan pengetahuan masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap sumberdaya yang menjadi objek kearifan pengelolaan. Namunpelaksanaan dari kearifan ini sangat dipengaruhi oleh tantangan manfaat ekonomi langsung (anggaran) dan keberadaan ekonomi masyarakat yang notabeneanya masih membutuhkan pemberdayaan.

Situasi pandemi covid 19 sudah membuat angka pengunjung wisasata Gili Trawangan menjadi menurun dan hampir tidak ada pengunjung dari luar yang datang melakukan aktivitas wisata dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jasa kawasan konservasi Gili Trawangan. Dengan turunnya angka kunjungan wisata memberikan penurunan aktivitas di darat dan laut yang bisa memberikan pengaruh bagi kawasan. Hal ini memberikan asumsi bahwa dengan minimnya pemanfaatan areal konservasi perairan Gili Trawangan membuat pengelolaan kawasan

konservasi menjadileluasa dari perencanaan sampai dengan epaluasi pengelolaan. Keleluasaan dan situasi kawasan konservasi yang mendukung serta kreteria berupa input, proses, output dan outcome dengan sejumlah indikator yang ada memberikan gambaran epektif atau tidaknya penegelolaan suatu kawasan konservasi perairan.

Dengan demikian penelitian dilakukan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan Gili Trawangan dimasa pandemi covid 19 ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan gili trawangan dimasa pandemi covid 19 dengan efektivitas pengelolaan sebelum masa pandemi covid 19 hususnya pada zona perikanan berkelanjutan.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Febriani (2020) Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penetapan zona inti merupakan bagian dari kegiatan penentuan zonasi disuatu daerah tertentu guna menjaga dan terpeliharanya sumberdaya ikan yang ada pada zona inti yang ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/ Kep-DJPRL I/2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi ditentukan berdasarkan kreteria dan indikator seperti disajikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Kriteria dan Indikator efektivitas pengelolaan kawasan perairan

NO	Kreteria	Indikator
1	Input	1. Konteks: status kawasan (dan kategori kawasan) 2. Perencanaan: rencana zonasi 3. Perencanaan: rencana pengelolaan 4. Sumber daya manusia (SDM) 5. Anggaran 6. Sarana dan prasarana
2	Proses	7. SOP pengelolaan 8. Pengawasan 9. Penjangkauan (outreach) 10. Kemitraan 11. Pemantauan sumber daya kawasan 12. Pengelolaan sarana dan prasarana 13. Perizinan 14. Pemberdayaan masyarakat

3	Output	15. Pemanfaatan terkendali 16. Ancaman 17. Tingkat kepatuhan 18. Pengetahuan masyarakat 19. Pemberdayaan masyarakat 20. Data dan informasi
4	Outcome	21. Kondisi target konservasi 22. Kondisi zona inti 23. Kondisi sosial ekonomi 24. Partisipasi masyarakat

Nurasmah (2015) Menunjukkan bahwa gili matra terdapat beberapa potensi: potensi ekologi, potensi ekonomi perikanan, dan potensi sosial budaya (pariwisata). Ketiga potensi ini merupakan modal dan tantangan dalam pengelolaan TWP gili matra. Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola, yang dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi.

Mira (2018) hubungan antara stakeholder dalam pengelolaan objek wisata gili trawangan belum berjalan dengan baik. hal ini dilihat dari empat aspek (satu komunikasi, dua kerjasama kurang antara suasta pemerintah dan masyarakat, tiga aspek koordinasi dan keempat aspek kolaborasi. Ini mengakibatkan potensi dan pemanfaatan sumberdaya akan mengakibatkan permasalahan baru serta berdampak terhadap pengelolaan Kawasan konservasi zona perikanan berkelanjutan.

Kapos (2008) menyatakan Penilaian efektivitas pengelolaan seyogianya tidak berdasarkan kepada keluaran (outputs) tetapi berdasarkan kepada hasil (outcomes) yang mencerminkan pencapaian tujuan-tujuan konservasi. Sebagai contoh, hasil dari kegiatan tata kelola pada pengelolaan KKP/L seperti, misalnya, penegakan hukum/aturan, tidak bisa hanya ditunjukkan oleh pencapaian berupa keluaran (seperti, meningkatnya jumlah patroli dan membaiknyasistem pelaporan), tetapi harus

ditunjukkan pada keberhasilan konservasi seperti perbaikan kondisi sumberdaya hayati karena meningkatnya kepatuhan dan dukungan kepada aturan, serta berkurangnya ancaman terhadap sumberdaya hayati.

Welly, Marthen dkk (2019) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan).

**METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan prosentase analisa data sejumlah 60 % dan studi lapangan dengan prosentase 40%. Studi Pustaka dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada responden kunci seperti , kepala BKKPN kupang wilayah kerja Gili Matra. Ketua POKMASWAS gili matra, Ketua POKDARWIS gili matra, serta beberapa pelaku usaha pariwisata Gili Matra. Data yang dikumpulkan dengan studi pustaka berupa alat Analisa tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berupa 4 (empat) kreteria dan 4 indikator dari 24 indikator yang sudah ada sebagaimana terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Tabel Kreteria dan Indikator Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Gili Trawangan.

No	Kreteria	Indikator
1	Input	Anggaran
2	Proses	Pemberdayaan masyarakat dan mitra pelaksanaan konservasi
3	Output	Pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap konservasi
4	Outcome	Partisipasi masyarakat terhadap konservasi

Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan Teknik wawancara mendalam untuk mengkroscek akurasi komponen indikator pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutannya serta partisipasinya terhadap pengelolaan kawawansan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data Hasil penelitian Efektivitas

pengelolaan kawasan konservasi perairan Gili Trawawangan dimasa pandemi covid 19 ditinjau dari empat kreteria dan empat indikator dari 24 indikator Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikeluarkan DIRJEN Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/ Kep-DJPRL I/2020 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. seperti tertera pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Data Hasil Epektivitas Pengelolaan Kawasan konservasi gili matra pada masa pandemi covid 19

No	Kreteria	Indikator	Jawaban Hasil Wawancara
1	Input	Anggaran	Anggaran dikurangi dari kantor pusat kupang, dihapusnyaprogram rehabilitasi dan conservation goes to school,
2	Proses	Pemberdayaan masyarakat	Tidak ada dimasa covid 19
3	Output	Pengetahuan masyarakat	Pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap konservasi tinggi
4	Outcome	Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat terhadap konservasi gili trawangandimasa covid meningkat

Sumber: Data primer

**Anggaran yang dikurangi selama masa covid 19**

Welly, Marthen dkk (2019) menjelaskan kawasan konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan sudah pasti memerlukan anggaran yang cukup, perencanaan yang mateng, pelaksanaan yang epektif serta analisa yang tepat. Kreteria input berupa anggaran menjadi poin penting didalam pengelolan kawasan konservasi perairan. Besar kecilnya anggaran mempengaruhi epektif tidaknya pengelolaan.

Sebagaimana intansi pemerintah lainnya dalam menerima anggaran dari pusat pada masa pandemi covid 19 hampir semua instansi pemerintah mendapat pengurangan jumlah anggaran, tidak terkecuali BKKPN Kupang sebagaimana hasil wawancara dengan koordinator BKKPN Kupang wilayah kerja gili matra Thri Heni Utami Radiman mengatakan balai yang dipimpinnya mendapat pemblokiran anggaran dan dialihkan ke penanganan covid

19, sehingga program kerja BKKPN Kupang juga dikurangi bahkan dihapus selama masa covid 19 seperti rehabilitasi ekosistem perairan dan conservation goes to school sebagaimana yang dilakukan sebelum pandemi covid19, dan monitoring pemanfaatan kawasan diadakan namun volumenya dikurangi. Dengan tidak terlaksananya program program ini membuat pengelolaan kawasan menjadi tidak epektif karena program ini adalah program inti dari konservasi. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Eko Purnomo pihak BKKPN Gili Matra mengatakan bahwa retribusi yang dihasilkan oleh BKKPN kupang wilayah kerja Gili Matra bisa menghasilkan PNBPN paling tinggi diantara sepuluh kawasan konservasi yang ada di Indonesia yaitu sekitar 2,6 milyar per enam bulan sebelum covid, baru baru ini pada bulan agustus 2022 masa covid 19 dari sejak mulai dubukanya kunjungan didapatkan PNBPN dari ritribusi sekitar Rp 600.000.000, namun karna keuangan langsung masuk ke pusat maka anggaran ini tidak bisa dialokasikan langsung untuk pengelolaan Kawasan Gili Matra oleh BKKN gili matra secara langsung, namun menunggu anggaran dari pusat terlebih

dahulu.

Pengelolaan kawasan konservasi gili trawangan memiliki sifat ketergantungan pada anggaran yang ada serta program yang diprogramkan dari jumlah anggaran yang ada bukan ditentukan oleh PNPB yang dihasilkan. Ada beberapa program yang dilakukan oleh jajaran koordinator BKKPN Kupang yang berkaitan dengan anggaran dan jumlah retribusi yang dihasilkan, diantaranya melakukan penertiban kepatuhan pembayaran tarif masuk pengunjung atau wisatawan yang melakukan aktivitas di kawasan konservasi perairan laut Gili Matra, seperti yang dijelaskan oleh Thri Heni Utami Radiman para wisatawan yang melakukan aktivitas menyelam di kawasan konservasi perairan laut Gili Matra dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **Pemberdayaan masyarakat, pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap hak dan kewajiban di kawasan konservasi gili trawangan**

Sebagaimana hasil penelitian terdahulu oleh Nurasmah pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa gili matra terdapat beberapa potensi: potensi ekologi, potensi ekonomi perikanan, dan potensi sosial budaya (pariwisata). potensi ekologi merupakan modal dasar yang bisa dijadikan sumber pendapatan dalam jangka waktu panjang, namun potensi ekologi ini sering dikorbankan karena alasan kebutuhan mendesak. Sehingga untuk melestarikan potensi ekologi maka perlu pemberdayaan masyarakat yang berintraksi dengan ekologi tersebut. Pemberdayaan juga bisa berhasil ketika didukung oleh pengetahuan dan kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang disepakati dalam pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Sedangkan pengetahuan merupakan tingkat masyarakat mengetahui apa itu daerah konservasi perairan gili matra serta kepatuhan untuk mengikuti ketentuan ketentuan

yang sudah disepakati dan mengindahkan ketentuan tersebut. Kapasitas masyarakat yang memanfaatkan Kawasan gili matra lebih didominasi oleh wisatawan baik manca maupun domestik. Ini yang menyebabkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan menjadi konsisten. Karena masyarakat pelaku adalah wisatawan, Tentu yang perlu diberdayakan dandinaikkan tingkat pengetahuannya mengenai daerah konservasi perairan adalah stakeholder yang bersentuhan langsung dengan wisatawan, dari pihak hotel, jasa wisata, travel, lapisan kelompok masyarakat diantaranya POKDARWIR, POKMASWAS serta masyarakat umum yang berintraksi dengan kawasan konservasi gili trawangan. Pemberdayaan dan pemberitahuan tentang kawasan mengenai hak dan kewajiban atas jasa lingkungan dari kawasan konservasi ini menjadi sangat penting, dari penertiban retribusi masuk kawasan sampai aturan bagaimana cara memanfaatkan kawasan semuanya dilakukan penertiban pada masa covid 19. Hasil wawancara dengan ketua koordinator BKKPN gili matra menyatakan upaya penertiban dilakukan, karena pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang (PP) Nomor 85 Tahun 2021 sejak Maret 2022. Sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka dan secara daring (online). Bahkan, imbauan disebar dalam group media sosial (WhatsApp) yang didalamnya ada para pelaku jasa usaha wisata bahari. Tim BKKPN Kupang Satuan Kerja Lombok Utara, juga sudah memberikan edukasi kepada para pengelola hotel, pelaku usaha jasa pariwisata dan operator perahu cepat di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Upaya sosialisasi ini bagian dari upaya pemberdayaan, sosialisasi ini menggambarkan ada permasalahan tersendiri pada lapisan pelaku usaha konservasi di kawasan gili trawangan, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Mira Janu Yustisi tentang "*Analisis Stekholder Dalam Pengelolaan Objek Pariwisata Gili Terawang*". Mira menjelaskan hubungan antara stakeholder dalam pengelolaan objek wisata gili trawangan belum berjalan dengan baik. hal ini dilihat dari empat aspek (satu komunikasi, dua kerjasama kurang antarasuasta pemerintah dan masyarakat, tiga aspek koordinasi dan keempat aspek kolaborasi. Untuk menindaklanjuti permasalahan itu maka dari pihak pengelola kawasan mengoptimalkan fungsi dan layanan dengan disosialisasikan system

transaksi secara online mengenai jasa kawasan konservasi. Sistem transaksi secara online ini diberi nama SEAPARK (Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi). Dengan system ini diharapkan kolaborasi, peran serta, pemenuhan hak dan kewajiban menjadi terlaksana dengan baik.

Demikian juga dengan Kreteria proses dengan indikator pemberdayaan masyarakat dan mitra pelaksanaan konservasi menjadi terhambat ini terkait dengan kurangnya anggaran untuk menjalankan indikator proses. Tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap konservasi relative tinggi hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat gili trawangan untuk menjaga kelestarian kawasan, terutama saat sepi pengunjung yang memanfaatkan kawasan konservasi. Kepatuhan untuk menjaga dan memberikan edukasi kepada pengunjung yang memanfaatkan kawasan. Begitu juga dengan kreteria outcome dengan indikator partisipasi masyarakat terhadap konservasi pada masa pandemic covid 19 berdasarkan wawancara dengan ketua pokdarwis gili matra bapak sapri dan ketua pokmaswas yang ada, karena kurangnya kesibukan usaha pariwisata maka sebagian besar masyarakat beralih melakukan aktivitas sebagai nelayan yang patuh dan peduli terhadap batasan zona dan pemanfaatan zona perikanan yang ada.

Dari berbagai masalah dan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan konservasi gili trawangan sebagai sumberdaya keberlanjutan ekonomi, pengetahuan tetap menjadi factor utama dalam keberhasilan pengelolaan baik efektif maupun sebaliknya dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi. Sebagaimana dikatakan oleh Yunita dalam (Junaidi 2005, p.10) menyatakan Pengetahuan lokal adalah kemampuan penduduk dalam menilai resiko yang akan dihadapi dalam menentukan keputusan keputusan yang menyangkut kegiatan dan hajat hidupnya. Berdasarkan pengertian itu dapat diartikan pengetahuan terhadap sesuatu hal menyebabkan orang mempunyai sikap yang positif terhadap hal tersebut, demikian juga sebaliknya tidak adanya pengetahuan menyebabkan sikap yang negatif terhadap suatu hal. Demikian juga halnya dengan masyarakat kawasan konservasi gili matra masyarakat

mengetahui dan memiliki kemampuan untuk menilai resiko yang akan dihadapi ketika sumberdaya yang dimiliki mengalami degradasi baik secara ekologi maupun ekonomi sehingga melalui kelompok masyarakat pariwisata (POKDARWIS) dan POKMASWAS yang ada di kawasan konservasi perairan melakukan kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang dengan teknik transplantasi terumbu karang di beberapa zonasi yang ada dengan sumber dana swadaya dan CSR dari BI. Dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat maka kegiatan tidak berhenti sebatas rehabilitasi namun masyarakat dengan sikap peduli melakukan upaya pemeliharaan dan menjaga terbukti dengan kegiatan monitoring secara berkala.

### **Partisipasi masyarakat terhadap konservasi gili matra meningkat disebabkan oleh kurangnya kunjungan pariwisata di gili matra**

Minimnya pemanfaatan areal konservasi perairan Gili Trawangan sebagai objek wisata pada masa covid 19 tidak menjadikan efektif tidaknya pengelolaan kawasan konservasi gili trawangan pada semua indikator, namun efektif tidaknya pengelolaan kawasan konservasi Gili Trawangan lebih dipengaruhi oleh indikator anggaran, dikarenakan indikator yang lainya seperti pengetahuan dan partisipasi sangat baik hal ini dimiliki oleh masyarakat yang tercerminkan kearifan lokal yang ada. Kepatuhan dan partisipasi bisa dilihat dari kepatuhan terhadap perdes konservasi yang dimiliki masyarakat gili trawangan. Asumsi pengelolaan kawasan konservasi menjadi leluasa dari perencanaan sampai dengan evaluasi pengelolaan dengan kurangnya pemanfaatan kawasan untuk aktivitas wisata tidak terjawab. Terlihat dari Aktivitas aktivitas BKKPN pada masa covid 19 ini dominan adalah monitoring pemanfaatan zonasi, dihapusnya program rehabilitasi dan conservation goes to school. Beda kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada situasi seperti ini masyarakat beralih menjadi nelayan dan sebagian diantaranya aktif melakukan konservasi dengan sumber dana swadaya masyarakat dan CSR. Dengan demikian tingkat efektivitas sebelum pandemi covid 19 lebih efektif daripada tingkat efektivitas dimasa pandemi covid 19. Dengan demikian sesuai

dengan yang dikatakan oleh Kapos (2008) penilaian efektifitas pengelolaan seyogyanya tidak berdasarkan kepada keluaran (output) tapi berdasarkan kepada hasil (outcome).

Dengan rasa kepedulian dan kepatuhan yang dimiliki oleh masyarakat Gili Trawangan yang ditunjang oleh pengetahuan mereka akan fungsi dan manfaat dan untuk menunjang kebutuhan yang berkelanjutan maka melalui organisasi masyarakat yaitu POKDARWIS dan POKMASWAS yang ada di gili matra ikut

berpartisipasi melakukan rehabilitasi trumbu karang dengan berbagai media yang ada dengan dukungan dana dari CSR BI dan dana swadaya masyarakat. Hasil partisipasi mereka seperti terlihat pada gambar 1 dan 2 berikut ini. Selain partisipasi dibidang rehabilitasi POKDARWIS dan POKMASWAS juga aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan tentang penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan masyarakat pelaku jasa wisata, dengan tema pemanfaatan zonasi yang tepat.

Gambar 1. Anggota Pokdarwis Tramenan Melakukan Tranplantasi

Terumbu Karang Dana Swadaya 2020



Sumber: Data Skunder (POKDARWIS TRAMENA 2020)

Gambar 2. Anggota Pokdarwis Tramena dan Pokmaswas petarando Melakukan Tranplantasi Terumbu Karang dengan bantuan dana CSR BI 2021



Sumber : Data Skunder (POKMASWAS PETARANDO 2021)

## SIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi perairan gili trawangan dimasa pandemi covid 19 tidak efektif jika dibandingkan dengan efektivitas sebelum pandemi covid 19. Indikator anggaran menjadi indikator penentu tidak efektifnya pengelolaan. Meskipun indikator pendukung lainnya mendukung, seperti indikator pengetahuan tentang konservasi dengan komponen lainnya tinggi demikian juga dengan indikator partisipasi dan dukungan masyarakat juga tinggi.

### Saran

Diharapkan besaran PNBP suatu kawasan konservasi berkorelasi dengan anggaran yang diterima di tahun anggaran berikutnya, karena anggaran bisa menggerakkan indikator yang lainnya dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agussalim. (2015) *Tujuh Kategori Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan - Balai Pelatihan & Penyuluhan Perikanan*

Ambon ([bp3ambon-kkp.org](http://bp3ambon-kkp.org)) diakses 21 september 2022

Azhar Muttaqin 2020. Profil Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan GiliMatra (Meno, Ayer, dan Trawangan) <http://www.bphn.go.id/data/documents/10pm030.pdf> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Diakses pada tanggal 21 september 2022.

Junaidi. (2005). *Persepsi Masyarakat Penambang Terhadap Terumbu Karang Di Pesisir Desa Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat* (tesis). Denpasar. Universitas Udayana

Kapos V, Balmford A, Aveling R, Bubb P, Carey P, Entwistle A, Hopkins J, Mulliken T, Safford R, Stattersfield A, Walpole M. "Calibrating conservation: new tools for measuring success". *Conservation Letters*. 2008 Oct;1(4):155-64.

Mira Janu Yustisi, (2018), "Analisis Stekholder Dalam Pengelolaan Objek Pariwisata

*Gili Terawang*”, Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, Vol.4 hal.64-80.

Mulyoto. 2011. *Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan*. KKP. PUSLAT KP. Jakarta

Nurasmah. (2015),” *Strategi Penguatan Regime Green Investment Dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Provinsi NTB*”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Slamet JP. 2021.  
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/kawasan-konservasi-perairan-di-indonesia> diakses 19 september 2022

Welly M. dkk (2019) *Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Berbasis KarangHidup dan Ikan Karang di Pulau Ay dan Rhun, Kepulauan Banda, Maluku* (Doctoral dissertation, IPB University)

Zola Febriani, Khairul Hafsar (2020),” *Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan*”. Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi Universitas Karimun (Jurnal Maritim) Vol. 1. No.2.